

ANALISIS PROGRAM BANTUAN MODAL KREDIT USAHA Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA JAMBI

Rosmiati

Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jambi

ABSTRACT

Salah satu kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam permodalan UMKM di kota Jambi yaitu melalui Program Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM). Dengan adanya bantuan modal KUPEM yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengatasi masalah keterbatasan modal yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas tentang proses penyaluran bantuan modal KUPEM di kota Jambi, dampak dari penyaluran program KUPEM bagi perkembangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di kota Jambi sebagai sasaran Program Kredit Usaha penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) yang telah memperoleh bantuan pinjaman modal periode tahun 2006-2012 yaitu berjumlah 48 usaha. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus sehingga diperoleh dengan jelas gambaran dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen.

Kata Kunci: Program KUPEM, Perkembangan UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang selama ini oleh para ekonomi dunia selalu dipuji karena bisa survive dan tahan dari terpaan krisis ekonomi global. Utamanya krisis yang terjadi akibat subprime mortgage di AS pada tahun 2008 silam. Transmisi krisis global menyebabkan pasar finansial bergejolak akibat ketidakpastian, akhirnya terjadi kemacetan aliran modal yang mengganggu perdagangan dan secara sistemik berefek pada pertumbuhan ekonomi. Secara normatif di dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, program utama pemerintah adalah bertujuan mendorong daulat perekonomian nasional dengan menysar sektor riil seperti pertanian, industri, pertambangan, energy, kawasan strategis, kelautan, dan pariwisata. Namun konsep ini belum diimplementasikan sepenuhnya.

Usaha kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan terhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen, SDM, kewirausahaan,

pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan SDM mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sbb:

1. Bagaimana pemberian Program bantuan modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUEM) oleh pemerintah kota Jambi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya program bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUEM) oleh Pemerintah Kota Jambi bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Jambi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUEM) oleh Pemerintah Kota Jambi kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di kota Jambi serta mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dengan adanya program bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUEM) bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah di kota Jambi.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan :

1. Usaha mikro: adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil: adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah: adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 adalah sbb:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sbb:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sbb:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sbb:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Peran Usaha UMKM

Menurut Rudjito (2003:40) setidaknya ada lima aspek utama yang menjadi alasan mengapa UMKM memiliki peran strategis, yaitu:

1. Aspek Manajerial
2. Aspek Permodalan
3. Pengembangan Program Kemitraan dengan usaha besar
4. Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu

Masalah yang dihadapi UMKM

Menurut Tambunan (2002:74) menyebutkan bahwa perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah antara lain:

1. Kesulitan Pemasaran
2. Keterbatasan Finansial
3. Keterbatasan SDM
4. Masalah bahan baku
5. Keterbatasan Teknologi

(KUPEM) Pemerintah Kota Jambi

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian dari pemerintah Kota Jambi, baik untuk pembinaan maupun pengembangannya, termasuk memberikan modal usaha dan kredit usaha penguatan ekonomi masyarakat bagi para pelaku UMKM. KUPEM merupakan salah satu upaya untuk membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran. Pengelolaan program bantuan modal dana KUPEM ditangani oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Jambi yaitu bidang UMKM. Para pelaku hanya diminta mengisi formulir tentang data dan kondisi usaha yang sebenarnya yang dilengkapi dengan lampiran yang diminta, setelah semua data usaha masuk, beberapa hari kemudian biasanya mereka akan melakukan kunjungan atau survei ke lokasi usaha.

Bila telah mendapatkan bantuan, pelaku UMKM diminta membuat laporan tentang penggunaan dan pemanfaatannya. Bantuan modal dana KUPEM ini tidak hanya diberikan sekali, namun bisa dilanjutkan kembali jika pelaku dapat membayar kredit tersebut secara lancar karena berkaitan dengan bentuk pembinaan terhadap perkembangan usahanya.

Indikator-Indikator UMKM yang berkembang

Berikut ini adalah tabel indikator-indikator UMKM yang berkembang:

Tabel 1. Indikator UMKM Berkembang

indikator	Tahapan Perkembangan		
	Mikro	Kecil	Menengah
Jumlah TK	2-4 orang	5-10 orang	10-25 orang
Fasilitas untuk TK	Tidak ada	Tidak ada	Mess dan alat transportasi
Jenis teknologi	Tradisional dan modern	Tradisional dan modern	Tradisional dan modern
Cara memperoleh bahan baku	Import	import	import
Jumlah penggunaan bahan baku	30 kg	50 kg	1 kuintal
Orientasi pasar	lokal	Lokal dan luar kota	Lokal dan luar kota
Cara pemasaran	Langsung ke pasar	Langsung ke pasar	Langsung ke pasar
Permodalan	Pinjam	Pinjam dan modal sendiri	Pinjam dan modal sendiri
Tempat produksi	sewa	Sewa dan milik sendiri	Milik sendiri

Sumber: hasil survei, 2007 kajian klaster industri tahu di kawasan cibuntu dengan model diamond porter

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM

Berikut ini adalah faktor-faktor pokok yang menyebabkan suatu industri dapat berkembang dengan baik, antara lain:

1. Modal, digunakan untuk membangun asset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri.
2. Tenaga Kerja, tenaga kerja dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu industri tentu akan membuat industri tersebut mampu berkembang di masa depan.

3. Bahan Baku, salah satu unsur penting yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri.
4. Transportasi, sangat dibutuhkan suatu industri baik untuk mengangkut bahan mentah maupun bahan jadi.
5. Sumber Energy/Tenaga, untuk bisa menjalankan perangkat mesin dan menunjang pekerjaan lainnya.
6. Marketing, pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain (Sugiyono,1999:11). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian ini mencoba memperoleh gambaran tentang pemberian program bantuan modal Kredit usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas koperasi dan UMKM terhadap perkembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mengambil salah satu objek penelitian dan mengamatnya lebih lanjut atau yang dikenal dengan studi kasus.

Sumber Data

1. Data internal, yaitu diperoleh dari pihak internal Dinas koperasi dan UMKM meliputi perkembangan jumlah usaha kecil yang menerima KUPEM selasma 2006-2012, dan proses penyaluran dilakukan oleh Dinas koperasi dan UMKM Kota Jambi.
2. Data eksternal, yaitu diperoleh dari luar Dinas koperasi dan UMKM antara lain, bagian sekretariat perekonomian pemerintah Kota Jambi. Data yang diambil meliputi jumlah seluruh peserta usaha kecil penerima KUPEM yang ada di Kota Jambi periode 2006-2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Program Bantuan Modal KUPEM

KUPEM yang sumber dananya dari APBD Provinsi Jambi yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi dan disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan adalah sbb:

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha masyarakat
2. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (petani dan UKM) terhadap jasa perbankan
3. Merubah perilaku masyarakat agar mampu mengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan
4. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait seperti kelompok Tani, Nelayan, Koperasi dan sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian KUPEM

Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Pemerintah Kota
Sebagai lembaga pemerintah daerah yang ada di Kota Jambi, pemerintah ota Jambi yaitu melalui Setda kota jambi membentuk Tim terpadu yang bertugas mengkoordinasi dan mengawasi dalam proses penyaluran KUPEM.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi
Sebagai instansi pemerintah yang terkait dalam program Kredit Penguatan ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kota Jambi yang berperan memfasilitasi dalam hal wirausaha dengan lembaga-lembaga permodalan seperti BUMN sebagai mitra dari pemerintah Kota. UMKM membentuk TIM teknis yang bertugas menyampaikan program KUPEM kepada masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha yang ada di Kota jambi.
3. BPD(Bank Pembangunan Daerah)
BPD(Bank Pembangunan Daerah) yang sekarang disebut Bank Jambi dalam proses penyaluran dana KUPEM, Bank ini berperan atau berfungsi sebagai fasilitator dalam melayani penyaluran dana KUPEM. Bank Jambi inilah yang mengelola dan menyalurkan dana kredit usaha penguatan ekonomi masyarakat(KUPEM) yang membutuhkan bantuan permodalan usaha.

Tahap-Tahap Penyaluran KUEPM

Adapun proses penyaluran dana KUEPM untuk UMKM di Kota Jambi adalah sbb:

1. Sosialisasi dan seleksi

Proses sosialisasi program KUEPM ini dilakukan oleh masing-masing sektor atau instansi terkait. Pada Dinas Koperasi dan UMKM sosialisasi program UMKM dilakukan oleh bidang Koperasi dan UMKM yaitu pada saat pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan. Bidang koperasi dan UMKM menyampaikan dan menjelaskan tentang program KUEPM kepada pelaku usaha yang berniat untuk memajukan usahanya, kemudian pelaku usaha diminta untuk membuat proposal. Proposal yang diterima dibatasi sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Jambi, Tim teknis akan turun ke lapangan untuk survey lokasi dan melihat apakah usaha tersebut berpotensi untuk berkembang.

2. Pendataan

Setelah proposal terkumpul di bagian pembiayaan dan UMKM dan telah ditinjau oleh TIM teknis, proposal diajukan lagi ke sekretariat di Kantor Walikota. Tim akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan penyesuaian dana yang akan diberikan kepada pelaku usaha.

3. Pendistribusian

Setelah proposal diterima dan telah ditelusuri sebelumnya oleh Tim terpadu, ada sebanyak 26 usaha yang terdiri dari beberapa sektor usaha telah ditetapkan sebagai penerima KUEPM namun harus menunggu aba-aba dari provinsi Jambi untuk dibuatkan SK pada bulan apa dana KUEPM dikucurkan. Sesuai tahap yang dikucurkan dari total dana KUEPM yang telah ditetapkan tersebut kemudian diberikan kepada sektor-sektor usaha yang telah ditetapkan sebagai penerima dana KUEPM.

4. Pencairan Dana KUEPM

Pada tahap ini pelaku usaha akan menerima modal usaha sesuai besaran yang telah diperhitungkan dan ditetapkan oleh Tim terpadu. Kemudian pemilik usahamembuka rekening tabungannya di Bank Jambi agar lebih mudah dalam proses penyaluran dana KUEPM tersebut.

5. Pengembalian Dana KUEPM

Pengembalian Dana KUEPM dilakukan setiap bulan. Para pelaku usaha

atau nasabah akan langsung menyetor uangnya ke Bank Jambi kemudian Bank akan memberikan slip setoran kepada nasabah, slip yang diberikan kemudian diserahkan lagi kepada pihak UMKM Kota Jambi sebagai bukti pembayaran, Dinas Koperasi dan UMKM juga menerima slip online dari Bank Jambi. Bagi pelaku usaha yang macet lebih dari 2 bulan maka akan diberikan surat peringatan oleh petugas Tim teknis yang akan melakukan penagihan intensif dengan mendatangi nasabah atau pelaku usaha tersebut.

Analisis pemberian program bantuan modal KUEPM oleh Pemerintah Kota Jambi kepada pelaku UMKM di Kota Jambi

1. Analisis jumlah UMKM yang mengikuti program KUEPM tahun 2006-2012

Berdasarkan data rekapitulasi laporan penyaluran dana KUEPM periode januari 2012 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Penyaluran Dana KUEPM

No	Keterangan	Tahun 2006-2008 (Rp)	Tahun 2009-2011 (Rp)	Tahun 2012-2013 (Rp)
1	Jumlah sektor perikanan	3	3	-
2	Sektor peternakan	5	1	-
3	Sektor dunia usaha jasa dan industri	15	18	3
4	Jumlah Usaha mikro	23	22	3
5	Akumulasi jumlah kredit	577.000.000	455.000.000	80.000.000
6	Sisa kredit	165.042.005	218.116.667	47.663.667

Sumber: data yang telah diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sektor usaha perikanan yang mengikuti program KUEPM juga mengalami penurunan
2. Sektor usaha peternakan yang mengikuti program KUEPM juga mengalami penurunan

3. Sektor dunia usaha jasa dan industri yang mengikuti program KUPEM mengalami penurunan jumlah usaha
4. Jumlah keseluruhan sektor usaha mikro yang telah mengikuti program KUPEM mengalami penurunan jumlah usaha
5. Akumulasi jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BPD Jambi untuk program UMKM juga mengalami penurunan
6. Sisa kredit yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha mikro terlihat pada tabel.

Artinya kemampuan program KUPEM di kota Jambi dalam membantu usaha mikro cukup rendah, hal ini disebabkan oleh para pelaku usaha yang tidak tepat waktu atau macet dalam mengembalikan dana KUPEM, oleh karena itu pemerintah harus memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh bagi kelangsungan program KUPEM pada tahun selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sbb:

1. Proses pemberian KUPEM yang dilakukan oleh petugas Tim Teknis dan Tim Terpadu berlangsung melalui beberapa tahapan.
2. Keseluruhan jumlah UMKM yang mengikuti program KUPEM periode 2006-2012 mengalami penurunan
3. Terjadi kemacetan pengembalian dana program KUPEM
4. Program KUPEM di kota Jambi diprioritaskan pada sektor jasa dan industri yang benar-benar berkompeten dalam mengembangkan usahanya

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kerjasama yang baik diantara perangkat pemerintah dan pelaku usaha serta pihak Bank mutlak diperlukan demi terciptanya perkembangan usaha ekonomi

masyarakat yang mandiri dan berdaya guna.

2. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap nasabah yang masuk dalam daftar kredit macet
3. Bagi pelaku usaha hendaknya berpartisipasi aktif dalam program KUPEM
4. Bagi kalangan akademisi dapat memperluas cakupan kajian penelitian, peranan bantuan modal KUPEM tidak hanya dilihat pada komponen program pinjaman bergulir tetapi dapat pula dilihat pada komponen program sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, M. 2007. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta

Moelong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rudjito, 2003. Peran lembaga keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan menanggulangi kemiskinan. *Jurnal ekonomi rakyat* Th. II No. 1- Maret 2003, www .Ekonomi Rakyat. Tanggal 4 Januari 2009.

Suharjono, 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* Jakarta: UPP AMP YKPN ikut mencerdaskan Bangsa.

Soetrisno, N. 2004. *Proses Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Makalah dipresentasikan pada makalah perkoperasian.

Tambunan, Tulus (2002) "Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya " Usahawan –N0-07, Th XXXI-Juli, Hal 3-15.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah